

DI BALIK YANG TERSURAT: KONTROVERSI ARSIP INDUSTRIALISASI DAN POLUSI DI SIDOARJO 1970-2000AN

Ronal Ridho'i
Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang
ronal.ridhoi.fis@um.ac.id

Abstract

This study attempts to examine controversial contemporary archives of industrialization and pollution in Sidoarjo, East Java since 1970-2000. The diversity of contemporary archives makes the source of history increasingly interpreted freely in accordance with the ideology of the archivist and the soul of his time (zeitgeist). This makes historical sources an increasingly multi-interpretive object and the truth is non-absolute. This study uses historical methods by utilizing the sources of newspaper archives, online news and government archives. This study found a difference in perspective and clumsiness of news substance. Archives produced during the New Order tend to see the progress of the Sidoarjo region from the massive industrialization, and see the pollution only on the level of physical impact, not from the root of the problem. The post-New Order archive sees environmental issues critically as it mentions the government's involvement in the emergence of pollution (industry).

Keywords: contemporary archives, industrialization, pollution, Sidoarjo.

Intisari

Kajian ini mencoba menelaah kontroversi arsip kontemporer mengenai industrialisasi dan polusi di Sidoarjo Jawa Timur sejak tahun 1970-2000an. Beragamnya arsip kontemporer membuat sumber sejarah semakin diinterpretasikan secara bebas sesuai dengan ideologi pembuat arsip dan jiwa zamannya (zeitgeist). Hal ini menjadikan sumber-sumber sejarah sebagai objek yang semakin multitafsir dan kebenarannya bersifat non-absolut. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan memanfaatkan sumber-sumber berupa arsip koran, berita online dan arsip pemerintahan. Penelitian ini menemukan adanya perbedaan perspektif dan kejanggalan substansi berita. Arsip yang diproduksi masa Orde Baru cenderung melihat kemajuan daerah Sidoarjo dari masifnya industrialisasi, dan melihat polusi hanya pada tataran dampak fisik, bukan dari akar permasalahannya. Arsip pasca Orde Baru lebih melihat permasalahan lingkungan secara kritis karena menyebutkan keterlibatan pemerintah terhadap munculnya polusi (industri).

Kata kunci: Arsip, kontemporer, Industrialisasi, Polusi, Sidoarjo.

PENDAHULUAN

Arsip merupakan bukti peninggalan (warisan budaya) masa lalu yang menyimpan memori tertentu. Arsip menjadi hal yang penting ketika seorang sejarawan dan ilmuwan sosial ingin menghadirkan kembali peristiwa masa lalu. Selama ini sejarawan selalu terjebak pada penggunaan arsip sebagai sumber utama penelitian, khususnya yang berupa dokumen resmi pemerintah. Ketika mereka mendapatkan dokumen yang bersifat rahasia maka seolah itu yang memberikan informasi tentang realitas sesungguhnya di masa lalu. Jika demikian, maka sejarah hanya dilihat sebagai kumpulan naskah, *history as documents*. Satu hal yang perlu diperhatikan di sini bahwa naskah oleh Brereton (1999:576) dianggap sebagai warisan masa lalu yang harus dihormati dan lestarikan.

Istilah arsip bisa diartikan dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, arsip diartikan sebagai naskah dan dokumen. Sedangkan dalam arti luas arsip merupakan segala sesuatu yang berisi memori tentang peristiwa yang pernah terjadi. Manoff (2004:10) berpendapat bahwa segala sesuatu tersebut bisa jadi benda-benda yang terdapat di dalam museum, perpustakaan, tempat penyimpanan arsip, dan segala hal yang mempunyai ingatan historis. Bahkan baru-baru ini arsip juga bisa berupa dokumen elektronik, suara, dan juga gambar-gambar visual. Hal itu dikarenakan pada saat ini perkembangan teknologi sudah semakin maju dan semakin mudah untuk diakses.

Dalam paper ini, penulis tidak secara detail menjelaskan pengertian arsip. Fokus permasalahan yang dikaji dalam paper ini yaitu bagaimana menggunakan dan memaknai arsip kontemporer dalam penulisan sejarah lingkungan di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam hal ini, arsip kontemporer dikategorikan sebagai arsip yang diproduksi sejak periode Orde Baru

hingga saat ini. Kategorisasi tersebut dilihat berdasarkan periodisasi sejarah Indonesia yang menyebutkan bahwa periode Orde Baru hingga tahun 2000an merupakan periode Sejarah Indonesia Kontemporer.

Penulis menelaah arsip dalam arti luas, yakni dokumen atau informasi apapun tentang industrialisasi dan polusi di Sidoarjo. Sumber utama yang digunakan di sini yaitu koran, berita online, dan dokumen dari beberapa institusi pemerintahan. Sumber-sumber yang digunakan merupakan arsip kontemporer yang berasal dari tahun 1970-an sampai tahun 2000an.

Ketika menelaah beberapa koran dan majalah yang terbit tahun 1970-an dan 2000-an, penulis menemukan perbedaan substansi berita. Walaupun korannya sama tapi ditemukan perbedaan ketika berganti rezim. Koran yang terbit pada tahun 1970-an cenderung memberitakan polusi dari sudut pandang penguasa dan kaum industrialis. Realitas yang muncul yaitu berita-berita polusi yang secara tegas menyudutkan pihak pabrik. Selain itu, berita polusi kebanyakan menyangkut dampak fisik lingkungan, seperti matinya ikan-ikan di Sungai Mas pada pertengahan 1970-an (*Tempo*, 24 September 1977), pencemaran Sungai Mangetan Kanal oleh pabrik tahu dan peternakan babi pada 1988 (*Surabaya Post*, 9 Mei 1989), dan matinya ribuan itik di Sungai Mangetan Kanal di awal 1990-an (*Kompas*, 3 Juni 1993).

Berbeda dengan pemberitaan polusi di penghujung Orde Baru. Kritik terhadap permasalahan lingkungan menjadi lebih beragam. Walaupun pencemaran fisik masih berlangsung, yang lebih dipermasalahkan oleh publik adalah peran pemerintah daerah. Pemerintah belum tegas menangani masalah polusi di Sidoarjo.

Hal ini kemudian memunculkan gerakan-gerakan lingkungan, gerakan korban pencemaran lingkungan, bahkan

demonstrasi massa.¹

Tujuan penulisan dari paper ini yaitu menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dari penggunaan sumber tentang industrialisasi dan polusi yang ada di Sidoarjo. Perbedaan perspektif yang ada dalam sumber kontemporer tersebut menarik untuk ditelaah agar mengetahui proses pembuatan, mengapa arsip tersebut dibuat, dan untuk kepentingan apakah arsip tersebut dibuat. Penulis berharap tulisan singkat ini dapat menjawab perbedaan perspektif tentang penggunaan sumber sejarah yang selama ini menjadi konsumsi wajib para sejarawan.

Perang Ideologi; Arsip yang Dibungkam dan yang Di(bebas)kan

Arsip kontemporer erat hubungannya dengan ideologi pembuat arsip. Dalam penelusuran arsip tentang industrialisasi dan polusi di Sidoarjo, penulis memfokuskan pada koran, berita di internet dan dokumen dari beberapa institusi. Penulis membandingkan berita-berita yang dimuat dalam koran periode Orde Baru dengan koran pasca Orde Baru. Dari kedua periode tersebut ditemukan perbedaan bahwa koran masa Orde Baru lebih pro pemerintah dibandingkan koran pasca Orde Baru.

Perbedaan rezim memunculkan perbedaan substansi arsip. Laporan dan berita yang terbit masa Orde Baru digunakan untuk kepentingan penguasa. Legitimasi² dimunculkan agar

¹ Lihat "Warga Dua Desa Memprotes Limbah Pengepakan Udang", *Surya*, 24 November 1997, hlm. 4. Lihat juga *Koleksi Arsip Proper BLH Sidoarjo: PT. Panggung Elektronik. Surat No. 13/FKPL/I/SUB/2001*

² Dalam konteks ini legitimasi kekuasaan dimunculkan dalam arsip agar kekuasaan tetap bisa dikontrol dan pemberontakan bisa dikurangi. Karena pada dasarnya peran arsip itu juga untuk mengangkat otoritas politik melampaui tradisi kebudayaan agar tidak terjadi resistensi terhadap kekuatan politis. Politisasi terhadap arsip ini terus dilakukan walaupun bisa mengakibatkan peru-

masyarakat pada saat itu percaya akan kekuatan penguasa. Laporan dan berita yang berupa dokumen tertulis tersebut sudah terlanjur memihak penguasa. Tidak ada yang tau jika di kemudian hari akan digunakan oleh para sejarawan dalam merepresentasikan sejarah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mona Lohanda (1998:4) bahwa arsip yang berbentuk dokumen tertulis tidak pernah dengan sengaja diciptakan untuk kepentingan sejarah.

Dalam menganalisis perbedaan ideologi penguasa tersebut penulis mengambil contoh berita di koran. Salah satunya yaitu berita di *Kompas* yang terbit di tahun 1970-an tentang industrialisasi di Sidoarjo. Dalam halaman utamanya, *Kompas* memuat kesuksesan pembangunan industri agraris, seperti ekspor beras, tambak bandeng dan lobster, industri krupuk udang dan petis. Jarang sekali diberitakan masalah polusi yang timbul akibat industrialisasi tersebut. Redaksi pada saat itu lebih sering membuat berita kesuksesan program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang dicanangkan oleh Soeharto. Ini terjadi karena rezim Soeharto berkuasa penuh terhadap pers yang ada saat itu. Ideologi Pancasila yang diterapkan kala itu tidak lain merupakan pemaksaan terhadap masyarakat untuk mengikuti kehendak penguasa.

Contoh yang dapat penulis hadirkan di sini yaitu berita di koran yang berjudul *Sidoarjo Kota Teladan Pembangunan di Jawa Timur*. Kabupaten Sidoarjo tahun 1969/1970 merupakan kawasan produktif di Jawa Timur yang menghasilkan ikan air payau terbanyak. Bahkan hasil ikan air payau di Sidoarjo jauh melebihi Taiwan. Hal ini disebabkan jumlah tambak yang ada di Sidoarjo 12

bahan sejarah. Lihat Benjamin Hutchens. "Techniques of Forgetting? Hypo-Amnesic History and the An-Archive". Dalam *SubStance*, Vol. 36, No. 2, Issue 113: The Future of Anarchism (2007), hlm. 37-55. University of Wisconsin Press.

kali lebih luas daripada Taiwan.³ Sehingga, ikan-ikan hasil tambak tersebut bisa diekspor ke luar negeri dan dapat menambah devisa negara maupun daerah (*Kompas*, 9 Februari 1970). Dengan adanya penambahan devisa dan keuntungan dalam bidang pertambakan maka pembangunan di kawasan ini dapat segera dilaksanakan sesuai dengan program Repelita.

Contoh lainnya yaitu berita yang berjudul *Daerah Bandeng yang Bebas Pengangguran*. Bupati Sidoarjo, Kolonel Pol. H. Soedarsono menjelaskan bahwa pada tahun 1974 Sidoarjo merupakan daerah bandeng yang bebas dari pengangguran. Tidak ada penduduk yang berstatus sebagai pengangguran. Bahkan pengusaha pabrik gula sampai mendatangi bupati untuk meminta tenaga kerja agar bisa bekerja di pabriknya. Selain itu, juga meminta izin pada bupati agar bisa mendatangkan tenaga kerja dari luar Sidoarjo karena semua orang di daerah ini sudah bekerja semua. Dari luas seluruh lahan di Sidoarjo, 52% adalah wilayah persawahan, 23% adalah wilayah pertambakan, dan sisanya merupakan daerah perindustrian yang semakin maju pada masa Orde Baru (*Kompas*, 14 Mei 1974).

Laporan di atas tidak cukup kuat untuk membuktikan di Sidoarjo tidak ada pengangguran, karena keterangannya hanya berasal dari wawancara terhadap Bupati Sidoarjo. Tidak adanya pengangguran digunakan sebagai alat untuk menunjukkan kesuksesan dan kesejahteraan masyarakat masa Orde

Baru. Tidak ada berita yang mengkritik pemerintahan Soeharto apalagi menyalahkan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkannya. Padahal, berdasarkan penelitian I Nyoman Adika (2003:148) ditemukan bahwa pada periode 1961-1971 dan periode 1971-1980, Surabaya dan Sidoarjo memiliki laju pertumbuhan penduduk yang paling tinggi di banding wilayah lainnya di Jawa Timur. Persentase pertumbuhan penduduk Surabaya saat itu 3,00%-3,04% dan Sidoarjo bahkan lebih tinggi, yakni 3,85%. Banyak tenaga kerja berdatangan dari luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Dengan pertumbuhan penduduk seperti yang dijelaskan di atas kemungkinan masalah pengangguran juga bisa terjadi di Sidoarjo.

Kompas yang terbit pasca Orde Baru menyajikan berita dari perspektif yang berbeda dari sebelumnya. Sejak akhir Orde Baru mulai sering muncul berita tentang polusi dan permasalahan lingkungan di Jawa Timur. Yang terpenting di sini yaitu adanya perubahan perspektif dalam pemberitaan. Hal itu disebabkan system pemerintahan yang digunakan negara ini sudah mulai mengarah pada demokrasi. Banyak wacana-wacana baru muncul dan menjadikan Soeharto sebagai kambing hitam dalam berbagai permasalahan yang timbul di Indonesia.

Contoh permasalahan tersebut dapat dilihat pada berita yang berjudul *Lintas Jatim: Pencemaran Lingkungan di Sidoarjo*. Berita yang dimuat dalam *Kompas* tersebut memberitakan bahwa tingkat pencemaran lingkungan di Sidoarjo telah bertambah tinggi, yakni lebih dari 50%. Hal ini disebabkan oleh limbah industri yang berdampak pada pencemaran air sungai dan polusi udara. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo seharusnya mulai mengusahakan bagaimana industrialisasi di Sidoarjo bisa berjalan dengan mengurangi kadar polutannya (*Kompas*, 31 Juli 2002). Jelas

³ Hal ini dikarenakan luas tambak di Sidoarjo saja dapat melebihi luas tambak ikan di seluruh Taiwan. Negara Taiwan memiliki luas tambak ikan sebesar 13.000 ha, sedangkan luas tambak di daerah Sidoarjo diperkirakan 165.000 ha. Jadi, dapat dikatakan luas tambak di Sidoarjo 12 kali lebih besar daripada di Taiwan. Lihat *Kompas*, 5 Februari 1970. *Sidoarjo Kota Teladan Pembangunan di Jatim: Penghasil Ekspor yang tak Pernah Menerima Devisa*.

perbedaan dalam berita ini yaitu kritik terhadap Pemda yang harus mencari jalan keluar permasalahan lingkungan akibat industrialisasi di Sidoarjo. Perbedaan ini terjadi setelah pergantian sistem pemerintahan dari yang otoriter ke demokrasi liberal. Jelas di sini kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai suatu kebebasan mengeluarkan pendapat.

Peristiwa pencemaran lingkungan tersebut didukung arsip dari institusi pemerintahan. Berdasarkan laporan yang penulis dapatkan dari Badan Lingkungan Hidup tahun 2002, menyatakan bahwa industrialisasi di Sidoarjo menimbulkan polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Industri manufaktur memberikan kontribusi besar terhadap polusi air, yakni sekitar 61,25%. Sedangkan sisanya ditimbulkan dari limbah rumah tangga sebesar 27,48% dan agro industri sebesar 11,27%. Ini merupakan bukti nyata bahwa sungai-sungai di Delta Brantas sudah mulai tercemar. Permasalahan ini bukan merupakan permasalahan yang ringan, karena tingkat pencemaran sudah melebihi 50% (*Koleksi Arsip BLH Sidoarjo, 2002*).

Tahun 2003 *Kompas* juga memberitakan masalah yang sama. Tingkat polusi (terutama polusi udara) di beberapa daerah, seperti Surabaya, Sidoarjo dan Gresik sudah bertambah tinggi. Polusi udara tersebut mengancam para penderita asma. Selain debu dan asap rokok, polusi udara yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor dan kegiatan industri di beberapa daerah tersebut merupakan salah satu penyebab yang dapat meningkatkan serangan asma (*Kompas, 74 April 6447*). Hal ini bukan satu-satunya permasalahan karena masih ada polusi tanah, polusi udara, dan permasalahan lingkungan sosio-kultural lainnya.

Permasalahan lingkungan lainnya yaitu bencana lumpur Lapindo yang terjadi pada tanggal 29 Mei 2006. Bencana tersebut menenggelamkan

empat desa di sekitar PT Lapindo Brantas Inc. Banyak warga yang kehilangan tempat tinggal karena peristiwa tersebut (Rifai, 2009:xvii). Perusahaan yang dimiliki Bakrie ini memberikan ganti rugi kepada warga, tetapi kenyataannya warga tidak mendapatkan ganti rugi sepenuhnya. Sudah lebih dari sepuluh tahun, semburan lumpur tersebut masih belum berhenti, walaupun saat ini volume semburannya telah berkurang. Semburan Lumpur Lapindo ini merupakan dampak dari eksploitasi lahan industri migas yang kemudian menjadi bencana nasional. Berbagai surat kabar dan berita online banyak yang berbicara tentang kasus ini. Ada pihak yang menyalahkan pemerintah dan perusahaan Lapindo tersebut. Tetapi ada juga yang memberitakan bahwa itu merupakan fenomena alam.

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa sumber-sumber kontemporer memang sangat dinamis. Perbedaan perspektif pun tidak dapat dipungkiri, di mana ada pihak yang pro pemerintah menyatakan bahwa bencana tersebut adalah fenomena alam. Sedangkan pihak yang pro terhadap rakyat mewacanakan berbeda, yakni bencana lumpur panas tersebut disebabkan oleh PT. Lapindo Inc. Koran-koran lokal maupun nasional juga berbeda-beda dalam memberitakan bencana tersebut.

Suryandanu (2009) menganalisis berita dalam tiga media nasional (*Kompas, Media Indonesia, dan Seputar Indonesia*) dan tiga media lokal (*Jawa Pos, Surabaya Post, dan Surya*). Ada media yang dengan konsisten menggunakan istilah Lumpur Lapindo (*Kompas*), tapi ada juga yang konsisten menggunakan istilah Lumpur Porong (*Surabaya Post*). Sementara media yang lainnya (*Seputar Indonesia, Media Indonesia, Jawa Pos, dan Surya*) cenderung tidak konsisten dalam memberikan label untuk peristiwa tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa sumber kontemporer khususnya dokumen tertulis sangat rentan dengan pelabelan (*labelling*). Tergantung sejarawan nanti akan mengambil label yang mana. Tapi, yang paling penting adalah menemukan makna di dalam label tersebut. Ini tugas berat bagi para sejarawan sebelum merepresentasikannya menjadi sebuah historiografi.

Penulis tidak hanya menggunakan sumber koran. Salah satu jenis sumber kontemporer yang banyak dibicarakan disini yaitu berita online. Banyak informasi yang bisa didapatkan dari internet, khususnya berita online tentang Sidoarjo. Sumber dari internet ini yang lebih rentan dibandingkan sumber yang lainnya. Karena berita atau artikel yang ada di internet seringkali mengandung asumsi yang tidak dilandasi dengan bukti otentik. Ini yang menyebabkan berita online masih dipertanyakan kembali kredibilitasnya. Penulis mengumpulkan berita-berita online yang khusus berbicara tentang industri dan polusi di Sidoarjo. Penulis sengaja mencari berita yang berasal dari surat kabar online dan situs resmi pemerintah. Beberapa situs yang diakses yaitu kompas.com, detik.com, sidoarjokab.go.id, beritasidoarjo.com, www.jpnn.com, dan sebagainya.

Contoh berita dari detik.com yang menyatakan bahwa lumpur Lapindo membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan juga ekonomi masyarakat Porong dan Tanggulangin. Pasca semburan, air sumur di tiga desa (Reno Kenongo, Siring dan jatirejo) mengalami pencemaran bau dan mengandung gas. Selain itu, pendapatan dari industri kulit dan *handicraft* di kawasan tersebut mengalami penurunan sejak tahun 2006 (detik.com, 2006). Pendapatan masyarakat di daerah Porong, Tanggulangin dan Jabon mengalami penurunan sampai 40% (*Radar Sidoarjo*, 20 November 2006).

Pemerintah daerah kemudian

mendeklarasikan Kampung Jetis sebagai kampung industri batik di Sidoarjo tahun 2009. Ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang mengalami penurunan akibat bencana lumpur Lapindo. Namun, menurut Johny Kusyairi industri batik di Jetis, Sidoarjo sudah bertahan jauh sebelum semburan lumpur Lapindo dan tidak ada pengaruh ekonomis yang berdampak pada industri batik tersebut (Kusyairi, 2011: 277-278). Dapat dipastikan Bupati Sidoarjo berusaha menutupi luka lama korban lumpur Lapindo dengan membuka kampung wisata baru yang berbasis industri batik.

Ideologi pembuat berita di sini penting untuk diketahui agar dapat dipahami makna tersurat dari berita yang ditulisnya. Ini memang hal sulit bagi penulis tapi bisa disiasati dengan melihat identitas penulisnya dan juga sumber-sumber yang dirujuk dalam berita tersebut. Jika identitas dan sumber beritanya meyakinkan maka dapat digunakan untuk bahan penulisan. Selanjutnya, jika beberapa syarat tersebut telah dipenuhi maka tugas sejarawan yaitu menganalisis dan merepresentasikan kembali dalam bentuk narasi. Di sini juga tidak terlepas dari pengaruh ideologi sejarawan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Beragamnya sumber kontemporer tentang Sidoarjo tersebut membuat peranan ideologi semakin kuat. Ketika ada perbedaan antara berita pada masa Orde Baru dan pasca Orde Baru sebenarnya hal ini merupakan perang ideologi⁴ antar rezim. Akan wajar ketika

⁴ Perang ideologi dalam memproduksi arsip memang wajar terjadi karena setiap arsip memang mengandung muatan ideologi tertentu. Mark Wigley (2005: 11) berpendapat bahwa arsip itu dilindungi secara fisik dan ideologis oleh peraturan-peraturan, protokol, prosedur, dan teknologi yang dibuat oleh pemerintah. Maksud dari perlindungan tersebut adalah untuk menjaga jarak antar pemerintah dan peneliti agar rahasia penting negara tidak dipublikasikan. Lihat Mark

Orde Baru dengan sifatnya yang otoriter telah runtuh dan berganti dengan era demokrasi liberal di tahun 2000-an, maka banyak wacana yang terbalik. Apa yang benar menurut Soeharto menjadi hal yang salah saat ini. Yang terpenting dalam tulisan sejarah itu adalah tidak mencari kambing hitam.

Antara Penghakiman dan Realitas Empiris

Arsip kontemporer yang diproduksi masa Orde Baru kebanyakan merupakan penghakiman terhadap realitas masa lalu. Apa yang tidak sesuai dengan program pembangunan sebisa mungkin disembunyikan dan tidak ditampilkan dalam berita. Kemiskinan, kesengsaraan rakyat dan pencemaran lingkungan jarang diberitakan agar pembangunan di era Orde Baru dinilai sukses. Orang-orang pemerintahan, industrialis dan para pemilik modal pada saat itu seperti kebal terhadap hukum karena tidak ada penghakiman yang berat terhadap mereka.

Misalnya, ketika ada permasalahan lingkungan tentang polusi air akibat industri di DAS Brantas tahun 1970-an. Penghakiman justru ditujukan kepada pemilik pabrik di sekitar DAS Brantas, yang juga melewati Kabupaten Sidoarjo. Anton Lucas dan Arief W. Djati (2007:322-323) yang meneliti polusi air di Sungai Mas (Kalimas), menyatakan bahwa banyak pabrik-pabrik yang didirikan di sekitar sungai sejak tahun 1970. Banyak dari pabrik tersebut yang tidak mempunyai alat pengolahan limbah dan mereka membuang limbah secara langsung di sungai. Kasus polusi air di Sungai Mas mulai diberitakan *Tempo* pada Juli 1975. Ketika itu, di Sungai Mas Surabaya banyak ikan yang mati keracunan. Sejak saat itu Pemerintah

Provinsi Jawa Timur mulai memperhatikan masalah limbah pabrik. Tahun 1980-an Gubernur Jawa Timur memberi peringatan pada pabrik-pabrik sekitaran Sungai Mas agar meminimalisir polusi yang mereka keluarkan.

Pertanyaannya, mengapa sejak awal pemerintah memperbolehkan dan tidak mengontrol pembangunan industri di sekitar sungai? Mengapa setelah tahu dampaknya bagi kesehatan manusia dan biota sungai, pemerintah baru turun tangan? Ini yang menjadikan sumber-sumber tidak dapat dipercaya seutuhnya dan membutuhkan analisis lebih mendalam. Ketika mendapat informasi pada masa Orde Baru sejarawan tidak boleh langsung mempercayainya tanpa mempertanyakan apa yang ada di balik sumber tersebut. Kepercayaan yang berlebihan terhadap sumber-sumber tersebut akan membuat tulisan menjadi ahistoris.

Berita-berita yang pada umumnya mengritik negara atau yang bisa menghambat program pembangunan harus dirahasiakan dari publik. Seperti berita tentang kemiskinan dan pengangguran masyarakat pedesaan atau peri-urban akibat industrialisasi. Berita tersebut jarang ditampilkan dan bahkan dirahasiakan oleh negara pada tahun 1970-an. Informasi yang bersifat rahasia memang wajar adanya. Seperti yang dijelaskan Stoler (2009: 28) bahwa dokumen dan informasinya terkadang bermuatan rahasia (*secret/geheim*) karena didalamnya terdapat masalah besar jika diketahui publik. Negara pun mempunyai hak untuk tidak memberitahukannya kepada publik. Jika dilihat pada permasalahan industrialisasi di Sidoarjo pada dasarnya memang merusak lingkungan. Maka merahasiakan masalah polusi akibat industrialisasi tersebut menurut rezim Orde Baru dianggap wajar. Ini dilakukan agar industrialisasi dianggap masyarakat sebagai fenomena yang bisa memajukan

Wigley. "Unleashing the Archive". Dalam *Future Anterior: Journal of Historic Preservation, History, Theory, and Criticism*, Vol. 6, No. 6 (6449), hlm. 54-15. University of Minnesota Press.

serta menyejahterakan negara dan daerah, bukan malah merusak lingkungan.

Dalam contoh kasus berita tentang industrialisasi di Sidoarjo, rezim Orde Baru telah menghakimi bahwa kabupaten ini merupakan daerah yang subur dan sejahtera. Hal ini dibuktikan dari meningkatnya hasil pertanian, pertambahan dan perkembangan industri manufaktur sejak tahun 1970-an. Bahkan Pemda menyebutkan bahwa tidak ada penduduk yang berstatus sebagai pengangguran. Rezim Orde Baru mencoba membuat wacana kesejahteraan dan kesuksesan pembangunan dengan mendominasi berita-berita di koran. Tujuannya agar para pembaca meyakini bahwa program pembangunan masa itu berhasil membawa bangsa Indonesia selangkah lebih maju.

Penghakiman tersebut mungkin tidak sesuai dengan realitas empiriknya. Walaupun Sidoarjo pada tahun 1970-an dinilai sebagai kawasan yang subur dengan kesejahteraan penduduknya, tapi masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, kemiskinan yang ada di beberapa desa di Sidoarjo dan pencemaran lingkungan akibat limbah industri dan limbah rumah tangga. Dua hal tersebut merupakan realitas sehari-hari yang tidak dilaporkan dalam berita atau laporan pemerintah kabupaten.

Menurut Wardah Hafidz (1993: 219-220) pada masa Orde Baru telah terjadi kemiskinan berlebihan atau "pemiskinan" penduduk. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya pendapatan, makanan, dan tempat tinggal yang layak; perlindungan (terhadap sistem kesehatan yang buruk, rasis, dan kekerasan); otoritarianisme dan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA); polusi industri; rendahnya kualitas pendidikan; dan kemiskinan identitas (Javanisasi kebudayaan, migrasi secara paksa, pengasingan, dan sebagainya). Beberapa hal di atas merupakan realitas empirik yang seharusnya dilihat oleh para sejarawan ketika menulis periode

Orde Baru.

Realitas empirik perlu dihadirkan dalam penulisan sejarah. Walaupun sumber yang didapatkan cenderung variatif karena dipengaruhi ideologi tertentu, tapi sejarawan harus bisa menghadirkan realitas dibalik itu semua. Sejarawan tidak harus menulis secara apa adanya mengenai apapun yang tersurat dalam arsip, tapi sejarawan juga harus bisa menghadirkan realitas yang tersirat dari arsip tersebut. Ini dilakukan agar penulisan sejarah lebih bersifat kritis dan penuh dengan analisis mendalam. Menurut Brereton (1999: 575-576) interpretasi sejarawan menjadi penting karena sebenarnya arsip tidak dapat berbicara tanpa ada yang menarasikannya. Walaupun memakai alat dan media yang canggih untuk bisa membacanya tetapi pada akhirnya arsip ini perlu dinarasikan. Di sini peran sejarawan dan para ilmuwan sosial lainnya dipertaruhkan.

Sejarawan tidak perlu khawatir menggunakan sumber kontemporer. Perbedaan ideologis dari pihak yang memproduksi sumber kontemporer merupakan keunikan tersendiri. Tergantung orang ingin melihat realitas itu dari perspektif yang mana. Yang jelas seorang sejarawan harus bisa menghadirkan makna yang tersirat dari sumber tersebut. Dokumen pemerintah, koran, maupun sumber internet bukan merupakan permasalahan untuk dijadikan sumber penulisan, yang penting identitas penulis dan rujukannya jelas. Soeri Soeroto (1980: 66-67) berpendapat bahwa peristiwa masa lalu itu tidak mungkin diulang maka yang bisa dilakukan sejarawan hanyalah melacak dan mengumpulkan dokumen yang pernah ada di masa lalu itu. Setelah itu tinggal menyajikannya sesuai dengan analisis sejarawan itu sendiri.

KESIMPULAN

Arsip tentang industrialisasi dan polusi termasuk arsip yang cukup "sensitif". Penggunaannya sebagai sumber sejarah harus dilihat dan dimaknai kembali oleh sejarawan. Banyak makna tersirat dalam arsip tersebut karena pengaruh-pengaruh politis dari suatu rezim. Sidoarjo adalah salah satu contoh dari sekian banyak daerah industri di Indonesia yang memiliki berbagai arsip kontemporer tentang industrialisasi dan polusi. Daerah ini tidak dapat dilepaskan dari perdebatan terkait permasalahan lingkungan. Perdebatan tersebut dapat dilihat sejak periode Orde Baru, yang mana kebanyakan arsip hanya melihat kemajuan industri, pembangunan, dan permasalahan lingkungan dari segi fisik, bukan dilihat dari proses kausalitas tentang kemunculan permasalahan lingkungan tersebut. Ketika rezim berganti maka terjadi pula perubahan dari arsip yang cenderung pro pemerintah ke arsip yang banyak mengkritik pemerintah terkait masifnya industrialisasi dan polusi di Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip, Koran, dan Majalah

Koleksi Arsip BLH Sidoarjo, 2002.

Koleksi Arsip Proper BLH Sidoarjo: PT. Pangung Elektronik. Surat No. 13/FKPL/1/SUB/2001.

Kompas, 9 Februari 1970; 14 Mei 1974; 3 Juni 1993; 31 Juli 2002; 30 April 2003;

Radar Sidoarjo, 64 November 2006.

Surabaya Post, 9 Mei 1989.

Surya, 68 November 1997.

"Surabaya Geger Kepati, Gegernya Air Kena Polusi", *Tempo*, 24 September 1977.

Buku

Daniels, Maygene F. & Walch, Timothy. 1984. *A Modern Archives Reader: Basic Readings on Archival Theory and Practice*. Washington: National Archives and Records Service.

Hafidz, W. "Poverties Beyond Economics". Hlm. 219-222. Dalam Dirkse, J.P. (eds.). 1993. *Development and Social Welfare: Indonesia's Experiences Under the New Order*. Leiden: KITLV Press.

Khusyairi, Johnny A. "Drawing the Present of the Past: Declaration of Kampung Batik Jetis Sidoarjo". Hlm. 267-286. Dalam Khusyairi, J.A. & Rabani, L.A. 2011. *Kampung Perkotaan Indonesia: Kajian Historis-Antropologis atas Kesenjangan Sosial dan Ruang Kota*. Yogyakarta: New Elmatara.

Lohanda, Mona. 1998. *Sumber Sejarah dan Penelitian Sejarah*. Depok: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.

Lucas, Anton & Djati, Arif W. "The Politics Environmental and Water Pollution in East Java". Hlm. 321-351. Dalam Peter Boomgaard (ed.). 2007. *A World of Water: Rain, Rivers and Seas in Southeast Asian Histories*. Leiden: KITLV Press.

Rifai, Rahmat. 2009. *Spatial Modeling and Elements at Risk Assessment of Sidoarjo Mud Volcanic Flow*. Yogyakarta: Graduate School Gadjah Mada University

Soeroto, S. "Penelitian Bahan-bahan Arsip: Masalah dan Kenyataan". Hlm. 63-79. Dalam Tim penulis. 1980. *Arsip dan Sejarah*. Jakarta: ANRI.

Stoler, Ann Laura. 2007. Colonial Archives and the Arts of Governance: On the Content in the Form. Hlm. 267-279. Dalam Blouin, F.X. & Rosenberg, W.G. (eds). *Archives, Documentation, and Institutions of Social Memory: Essay from the Sawyer Seminar*. University of Michigan Press.

_____. 2009. *Along The Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense*. New Jersey:

Princeton University Press.
Suryandaru, Y.S. 2009. *Kasus Lumpur Lapindo dalam Bingkai Media Massa*. Surabaya: LPPM Unair dan TIFA Foundation.

Disertasi, dan Terbitan berkala

Adika, I Nyoman. 2003. *Perkembangan Wilayah Pinggiran Kota Metropolitan Surabaya dan Mobilitas Tenaga Kerja (Kasus Kabupaten Sidoarjo)*. Disertasi UGM. Tidak diterbitkan.

Brereton, J.C. "Rethinking Our Archive: A Beginning". Dalam *College English*, Vol. 61, No. 5 (Mei, 1999), hlm. 574-576. National Council of Teachers of English.

Hutchens, Benjamin. "Techniques of Forgetting? Hypo-Amnesic History and the An-Archive". Dalam *SubStance*, Vol. 36, No. 2, Issue 113: The Future of Anarchism (2007), hlm. 37-55. University of Wisconsin Press.

Manoff, M. 2004. Theories of the Archive from Across the Disciplines. Dalam *Libraries and the Academy*, Vol. 8, No. 1, hlm. 9-25. Johns Hopkins University Press.

Wigley, M. "Unleashing the Archive". Dalam *Future Anterior: Journal of Historic Preservation, History, Theory, and Criticism*, Vol. 6, No. 6 (2005), hlm. 10-15. University of Minnesota Press.

Sumber online:

Balk, G.L. (eds.). *History of the Archives*. Dalam <http://sejarah-nusantara.anri.go.id/about-the-voc-and-its-archives/>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2015, pukul 13.35 WIB.

Niemeijer, Hendrik E. *The Central Administration of the VOC Government and the Local Institutions of Batavia (1619-1811) – an Introduction*. Dalam [http://sejarah-nusantara.anri.go.id/about-](http://sejarah-nusantara.anri.go.id/about-the-voc-and-its-archives/)

[the-voc-and-its-archives/](http://sejarah-nusantara.anri.go.id/about-the-voc-and-its-archives/). Diakses pada tanggal 23 Juni 2015, pukul 13.51 WIB.

Detik news, 8 Juni 2006. *Gara-gara Lumpur Gas, 3 Desa Krisis Air*. Dalam <http://news.detik.com/berita/612254/gara-gara-lumpur-gas-3-desa-krisis-air>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2015, pukul 14.00 WIB.